

## **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kegiatan Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kenjeran Surabaya**

**Andika Firmansyah<sup>1)</sup>, Sri Kamariyah<sup>2)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>3)</sup>**

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: af89023@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pantai Kenjeran memiliki pemandangan yang sangat indah serta mempunyai lokasi yang strategis serta akses jalan yang sudah memadai. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai para nelayan untuk mencari dan menangkap ikan lalu hasil dari tangkapan itu bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kenjeran Surabaya dan mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kawasan Pantai Kenjeran Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil cara mengetahui bagaimana pemberdayaan melalui perikanan di Kecamatan Kenjeran adalah memberdayakan masyarakat pesisir pantai. Ini merupakan satu program unggulan dari Departemen Perikanan dan Kelautan untuk mengembangkan masyarakat pesisir yang mata pencarian bersumber dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Program yang dirancang oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Pantai Kenjeran adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut disalurkan melalui dana PUMP yang masuk ke rekening nelayan kelompok usaha bersama (KUB). Program ini menjadi wadah para KUB dalam mendapatkan bantuan penambahan modal, pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harkat dan martabat kelompok. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koneksi sehingga saat mendaftar selalu masuk daftar tunggu serta saat ini mulai diterapkannya peraturan baru bahwa untuk mendapatkan bantuan harus memiliki legal hukum.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Pesisir, Pantai Kenjeran**

### **Abstract**

*Kenjeran Beach has a very beautiful view and has a strategic location and adequate road access. This can be utilized as fishermen to find and catch fish and then the results of the catch can be sold or consumed by themselves. This research aims to find out how fisheries empowerment in improving family welfare in Kenjeran Subdistrict Surabaya and find out what the inhibiting and supporting factors are in the Kenjeran Beach Area Surabaya. This research uses qualitative research using a descriptive approach with data collection techniques, literature study, observation, interviews, and documentation. The result of how to find out how empowerment through fisheries in Kenjeran District is empowering coastal communities. This is one of the flagship programs of the Department of Fisheries and Marine Affairs to develop coastal communities whose livelihoods are sourced from the exploration and utilization of coastal and marine resources. The program designed by the government to empower coastal communities, especially in Kenjeran Beach, is the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program. The program is channeled through PUMP funds that go into the accounts of fishermen joint business groups (KUB). This program is a forum for KUBs to obtain additional capital assistance, knowledge and experience in improving the quality of human resources, increasing income, and improving the dignity of the group. The obstacles faced are the lack of connections so that when registering, they are always on the waiting list and the new regulation that to get assistance must have legal status.*

**Keywords: Community Empowerment, Coastal Community, Kenjeran Beach**

## **A. LATAR BELAKANG**

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar pada substansi sektor perikanan, terutama perikanan laut. wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Surabaya. Luas wilayahnya adalah 48.033 km<sup>2</sup>, dan pada tahun 2022 kepadatan penduduknya mencapai 857 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang tinggal di sana sebanyak 41.144.067 jiwa. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Samudera Hindia berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur di selatan, Laut Jawa di utara, Selat Bali (Provinsi Bali) di timur, dan Provinsi Jawa Tengah di barat. Selain sejumlah pulau kecil di Laut Jawa, seperti Kepulauan Masalembu, Pulau Sempu, dan Nusa Barung, wilayah Jawa Timur juga mencakup Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan Kepulauan Kangean. Jawa Timur dianggap sebagai pusat keuangan dan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Hal ini mempunyai dampak ekonomi yang signifikan dimana menyumbang 15% Produk Domestik Bruto negara.

Kecamatan Kenjeran termasuk wilayah geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Utara, dengan ketinggian ± 4 – 12 meter diatas permukaan laut dan memiliki 4 kelurahan (Kelurahan Kedung Cowek, Kelurahan Bulak, Kelurahan Kenjeran Komplek Kenjeran, serta Kelurahan Sukolilo). Pantai Kenjeran merupakan salah satu kawasan pesisir yang mempunyai potensi besar. Dalam meningkatkan perekonomian dan lingkungan hidup. Jumlah penduduk di Kecamatan Kenjeran berdasar hasil registrasi 2015 adalah sebanyak 42.302 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Bulak yaitu sebesar 18.576 jiwa atau sama dengan 43,9 persen dari seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Bulak. Jumlah penduduk terkecil berada di Kelurahan Kedung Cowek yaitu sebesar 5.564 jiwa atau sama dengan 13,1 persen dari seluruh penduduk yang ada di kecamatan Kenjeran. Menurut RZWP (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir) Surabaya, pesisir timur

Surabaya pada dasarnya merupakan pantai berlumpur yang menghadap Selat Madura. Wilayah daratan didominasi oleh kawasan wisata, pemukiman nelayan, ekosistem hutan bakau, dan wisata bahari. Sedangkan wilayah perairan dibatasi sektor kelautan dan perikanan.

Kecamatan Kenjeran juga menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Potensi daerah ini menjadi modal masyarakat dalam rangka pembangunan daerah. Dengan potensi tersebut, masyarakat yang berada pada wilayah pesisir menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumberdaya hasil perikanan. Sebagai wilayah pesisir, karakteristik masyarakat umumnya sebagai nelayan. Sebagiannya ada yang sebagai pengolah hasil perikanan. Pengolahan hasil perikanan di wilayah Kenjeran sebagian besar memanfaatkan hasil tangkapan berupa ikan menjadi bahan baku olahan makanan. Usaha rumah tangga skala kecil di daerah tersebut seringkali terlibat dalam pengolahan hasil perikanan.

Usaha pengolahan hasil perikanan dengan skala rumah tangga umumnya berkategori usaha menengah kecil (UMK). Produk yang dihasilkan bervariasi sesuai dengan bahan baku. Produk yang dibuat antara lain amplang, kerupuk, ikan asin, terasi, dan Hasil pengolahan hasil perikanan tersebut menjadi produk ciri khas wilayah pesisir di Kecamatan Kenjeran. sektor UMK juga turut berperan dalam perekonomian daerah. Peran tersebut berupa pengembangan ekonomi masyarakat. Fakta ini menunjukkan keberadaan UMK dalam kehidupan finansial masyarakat. Dalam pandangan ini, salah satu penopang utama terciptanya sistem perekonomian kerakyatan sebagai salah satu bentuk perekonomian nasional adalah peran UMK. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur 320.529 dari pengunjung mancanegara yang berkunjung ke Indonesia memilih Jawa Timur sebagai tujuan wisatanya. Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur dan sekaligus kota metropolitan nomor dua seharusnya mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan baik lokal maupun

mancanegara ke kota pahlawan tersebut. Pantai Kenjeran merupakan satu-satunya pantai di Surabaya, kota yang hakikatnya berada di pesisir pantai. Pesisir Kenjeran memiliki sejumlah tempat wisata yang kurang dimanfaatkan, seperti Pantai Watu-Watu, Pantai Kenjeran, Taman Kenjeran, dan produk olahan hasil laut masyarakat sekitar.

Kenjeran merupakan salah satu dari berbagai macam jenis objek wisata yang terdapat di Kota Surabaya di antaranya adalah THP (Taman Hiburan Pantai) THP Kenjeran adalah tempat atau obyek wisata yang berada di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DIKPARTA) dan dimiliki oleh pemerintah Surabaya. Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran sebagai objek wisata yang terdapat di Kelurahan Kenjeran ini merupakan objek wisata yang selalu mengutamakan dan mengusahakan pelayanan dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Berbagai fasilitas di Pantai Lama Kenjeran ini diantaranya adalah stand depot makan, tempat parkir, mushola, toilet, permainan anak, panggung diatas air THP Kenjeran, jembatan kayu diatas air THP Kenjeran, Sumber pendapatan utama masyarakat adalah penyewaan perahu, kios olahan pernak-pernik pantai, kios ikan yang mengolah ikan menjadi bahan makanan seperti kerupuk, terasi, dan ikan asin, serta hasil penjualannya. Oleh karena itu, THP Kenjeran menjadi krusial dalam penciptaan atraksi wisata guna memenuhi amanahnya. Obyek wisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan obyek wisata, agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi wisatawan dan masyarakat sekitar.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Teori Pelayanan Publik**

Menurut Moenir (2008: 16) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Menteri

Pendayagunaan Aparatur negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman yang dikutip oleh (Sinambela, 2006:4) menyatakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai cara yang telah ditetapkan. Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.

### **2. Asas-Asas Pelayanan Publik**

Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas pelayanan

publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a) **Transparansi:** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b) **Akuntabilitas:** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) **Kondisional:** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d) **Partisipatif:** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e) **Kesamaan hak:** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f) **Keseimbangan hak dan kewajiban:** Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### 3. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Hayat (2017:69), kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional, dan bertanggung jawab serta kompeten.

Untuk dapat menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu adanya tolak ukur kualitas pelayanan yang menunjukkan

apakah kualitas pelayanan yang diberikan dapat dikaitkan baik atau buruk.

Menurut Zeithaml (1990) ada 10 dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

- a) *Tangibles* (nyata), yaitu fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi.
- b) *Reliability* (handal), yaitu kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat.
- c) *Responsiveness* (pertanggungjawaban), yaitu kemampuan membantu konsumen bertanggung jawab terhadap suatu mutu pelayanan yang diberikan.
- d) *Competence* (kompeten), yaitu tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam pemberi pelayanan.
- e) *Courtesy* (sopan), yaitu sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan konsumen, mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
- f) *Credibility* (jujur), yaitu sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
- g) *Security* (aman), yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari bahaya dan resiko.
- h) *Access* (kemudahan), yaitu untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
- i) *Communication* (komunikasi), yaitu kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau inspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
- j) *Understanding the customer* (mengerti akan pelanggan), yaitu melakukan usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

### 4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bekerja sama dengan masyarakat untuk

meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat tersebut. Upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan mengelola lingkungannya guna memenuhi kebutuhannya merupakan cara lain untuk memahami istilah pemberdayaan. Keinginan keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lainnya.

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemah dari istilah asing “*empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pembangunan. Kedua istilah ini dapat digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks tertentu.

## 5. Proses Pemberdayaan

Menurut (Sunartiningsih, 2016) proses pemberdayaan kelompok usaha bersama yaitu menganalisis situasi yang ada di lingkungannya serta memecahkan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat telah menjadi mainstream upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, pembangunan dibangun berdasarkan apa yang sudah ada di masyarakat dan bukan dimulai dari awal. Pemberdayaan adalah proses mengembangkan sumber daya yang sudah dimiliki masyarakat agar lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu statistik yang lingkupnya berupa mengumpulkan,

membentuk, menata, menggarap, mempresentasikan, dan menelaah data supaya mendapatkan gagasan yang konkret, padat, dan terarah akan peristiwa atau fenomena tertentu (Sholikhah, 2016).

Menurut Yuliani, 2018, penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pendekatan kualitatif sederhana yang menggunakan alur induktif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menanyakan apa, siapa, dimana, serta bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi untuk kemudian ditelaah lebih dalam agar pola dalam fenomena itu dapat muncul (Kim, Sefcik, & Broadway, 2017). Pendekatan ini memiliki fleksibilitas pada pertanyaan penelitian dan temuan penelitian yang berubah di lapangan selama dilakukannya penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif biasanya berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang mempunyai arti dan memicu pemahaman ril yang lebih daripada angka dan frekuensi (Nugrahani, 2014). Peneliti menggunakan data yang berisi deskripsi rinci, lengkap, dan menyeluruh yang mengilustrasikan fenomena sebenarnya.

Kedalaman penelitian kualitatif ditingkatkan dengan pengaturan sosial atau fenomena yang melibatkan aktor, peristiwa, lokasi, dan periode. Sehingga beberapa fenomena sosial dapat diungkap melalui penelitian kualitatif dengan menggambarkan realitas secara akurat dengan kata-kata berdasarkan pengumpulan.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi perhatian utama dalam studi. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kenjeran Surabaya serta faktor penghambat dan pendukung yang ada di kawasan pantai kenjeran Surabaya dan

untuk mengetahui strategi apa yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan pemberdayaan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah pesisir Pantai Kenjeran Surabaya berkembang.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan data, responden, serta informan penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Surabaya, yaitu Dinas Perikanan dan kelautan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini merujuk dari rumusan masalah yang menjadi topik penelitian serta mempertimbangkan keterjangkauan peneliti dalam pengambilan data. Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian bertempat di lokasi Pantai Kenjeran Jalan Kenjeran.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Kenjeran

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Kenjeran merupakan pendekatan partisipasi masyarakat melalui metode strategi *bottom-up* yang diiringi dengan peningkatan kerjasama kemitraan dana usaha pengelolaan pembangunan berkelanjutan dan transparan dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam rangka perencanaan dan penentu kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Pendekatan *bottom-up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian di bidang pemerintahan, *bottom-up* planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga

setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan serta komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan.

Dana bantuan program pemberdayaan pada tiga nelayan KUB di Pesisir Pantai Kenjeran kota Surabaya yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan kota Surabaya yang di transfer pada rekening KUB masing-masing kemudian tiap-tiap KUB melalui ketua membagi dan mempergunakan dana tersebut sesuai kebutuhan anggota untuk membeli ataupun melengkapi alat tangkap yang rusak ataupun belum ada seperti lancing, mesin, dan peralatan tangkap lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan metode pemberdayaan, perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar pelaksana pembangunan yaitu masyarakat pesisir itu sendiri, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan Lembaga Lembaga lain yang terkait. Keberhasilan program PEMP akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya sistem kelembagaan yang melibatkan semua pihak

Pada pendapat Cendon dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, hukum memperbaiki hak dan harapan yang mungkin dari yang terakhir dan fungsi dan tugas mantan sebanyak yang sesuai dengan masing-masing administrasi unit, seperti yang sesuai dengan masing-masing pejabat publik. Bahkan bisa dikatakan bahwa, akuntabilitas administratif memberikan warga negara dengan jaminan perhatian dan perlakuan yang sama setinggi-tingginya sebagai kepastian total, setidaknya, mengenai bentuk hubungannya dengan administrasi organ, prosedur, dan kemungkinan hasilnya.

### 2. Kepemilikan

Pantai Kenjeran Kota Surabaya, program PEMP dengan bantuan dana PUMP berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya perencanaan setiap kegiatan KUB yang menetapkan peraturan mengikuti pedoman dalam melaksanakan tugas

sehingga mulai dari pemasukan dan pengeluaran nelayan KUB jelas memiliki bukti pertanggungjawaban seperti laporan penggunaan dana PUMP yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam kelompok usaha bersama (KUB) dan adanya laporan perbulan setiap pendapatan.

### 3. Keseimbangan dan Keadilan

Para nelayan KUB telah menjalankan tugasnya dengan cara seperti mengorganisir pengelolaan dana program pemberdayaan mulai dari pemasukan hingga pengeluaran sesuai kebutuhan dan pendapatan yang mereka hasilkan. Keseimbangan antara dana yang dimanfaatkan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan dana. Kemudian bantuan dana program pemberdayaan dibagikan secara merata dana untuk setiap anggota KUB. Sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu keseimbangan dan keadilan.

Tanggung jawab suatu kewajiban atau tugas untuk diterima dan dilaksanakan dengan baik. Dalam artian ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas, seseorang tersebut harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Namun dengan keterbatasan SDM serta kurangnya kualitas SDM tidak membuat kualitas pelayanan melemah. Pihak Dinas Perhubungan mampu memberikan pelayanan yang profesional.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Kenjeran melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan pemberian dana PUMP yang masuk ke rekening KUB masing-masing dalam penambahan modal pelaksanaannya menggunakan pendekatan *bottom-up* dan pola partisipasi. Dengan adanya penambahan

modal para anggota KUB dapat meningkatkan volume usaha sehingga pendapatan meningkat.

- b) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Pantai Kenjeran kota Surabaya dengan menggunakan dana PUMP merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi modal, nelayan KUB sebagai pengelola dana usaha merupakan bentuk kerjasama.

### 2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian di atas, diantaranya:

- a) Untuk mencapai keberhasilan yang semaksimal mungkin maka kedepannya perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya dan pengendaliannya yang merupakan satu kesatuan terpadu, partisipan, dan *bottom-up*.
- b) Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN mulai dari aspek pendanaan, bantuan pemasaran produk perikanan dan pengelolaan produk perikanan, sehingga proyek pemberdayaan tidak berhenti setelah pemberdayaan dari pemerintah selesai.
- c) Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN mulai dari aspek pendanaan, bantuan pemasaran produk perikanan dan pengelolaan produk perikanan, sehingga proyek pemberdayaan tidak berhenti setelah pemberdayaan dari pemerintah selesai.
- d) Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir perlu menambahkan rancangan pola keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam menolong pedagang dan nelayan kecil agar dapat menggantikan peran tauke dan tengkulak ikan di perkampungan nelayan yang sering kali menyengsarakan dan merugikan pihak nelayan.

## REFERENSI

- Hamsah, A. I., Hakim, L., & Razak, R. (2020). Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 285–298.
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 1(1), 15–30.
- Hirawan, Z. (2017). Pelayanan publik di Kabupaten Subang (Studi kasus pelayanan uji kir dan trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 91–102.
- Januar, R., Hendrayady, A., & Setiawan, R. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang. *Disertasi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Kurniawan, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Angkutan Kota (Uji KIR). *Disertasi*. Universitas Islam Riau.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cahaya Aktiva*, 2(2), 1–13.
- Purukan, J. J. W. (2017). Akuntabilitas Kerja Pada Perusahaan Umum Damri Stasiun Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(4), 125–142.
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition Journal*, 11(2), 325–351.
- Septianti, F. S., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Program E-Uji KIR di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tandes Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 7(1), 62–88.
- Supriyanti, N. W., & Winaya, I. K. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Sidemen Karangasem). *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 7(1), 65–73.